

## KIAI NU DAN POLITIK (KETERLIBATAN KIAI NU JEMBER DALAM KONTESTASI PILPRES 2019)

**Abdul Haris**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

[abdulharis.albidayah3b@gmail.com](mailto:abdulharis.albidayah3b@gmail.com)

**Abdulloh Dardum**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

[dardum87@gmail.com](mailto:dardum87@gmail.com)

### **Abstrak:**

Kajian tentang dinamika dan kiprah politik kiai selalu menarik untuk terus dikaji dari berbagai sudut pandang berbeda. Pada kontestasi Pilpres 2019, beberapa kiai NU struktural maupun non struktural di Jember terlibat aktif dalam memenangkan pasangan calon no urut 1, Jokowi dan Ma'ruf Amin. Penelitian ini ingin mengungkap makna politik dalam perspektif kiai NU Jember, serta motivasi dan bentuk keterlibatan mereka dalam kontestasi politik praktis (Pilpres 2019). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Secara operasional penggalian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara mendalam terhadap para informan yang sudah ditetapkan, dan dokumentasi. Data yang didapatkan setelah itu dianalisa melalui dua tahap, yaitu selama proses pengumpulan data di lapangan dan setelah data tersebut terkumpul dengan langkah; 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Mayoritas kiai NU Jember memaknai politik sebagai perjuangan untuk mewujudkan kemashlahatan umat. Politik juga dimaknai dengan upaya untuk menjaga aqidah umat dari faham atau ideologi yang berseberangan dengan NU. 2) Ada dua motivasi yang mendorong keterlibatan kiai NU Jember dalam politik praktis, yaitu orientasi dakwah dan orientasi ideologis. 3) Bentuk keterlibatan kiai NU dalam politik praktis (Pilpres 2019) di Kabupaten Jember dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya memberikan dukungan melalui edaran/maklumat, konsolidasi sesama kiai dan instruksi secara langsung kepada para santri, wali santri, dewan guru/*asatidz*, alumni dan simpatisan pesantren.

**Kata Kunci:** *Kiai, Politik, NU*

### **Abstract:**

*The dynamics and political work of the kiai are always interesting to be studied from various points of view. In the 2019 presidential election contest, several structural and non-structural NU kiai in Jember were actively involved in winning the candidate pair number 1, Jokowi and Ma'ruf Amin. This research intends to reveal the political meaning from the perspective of the kiai NU Jember, as well as their motives and forms of involvement in practical political contestation (Pilpres 2019). This research was conducted using a qualitative approach. Operationally the data mining in this research was carried out through observation, in-depth interviews with the informants who had been assigned, and documentation. The data obtained after that were analyzed in two stages, namely during the data collection process in the field and after the data was collected by steps; 1) data reduction, 2) data presentation,*

## Kiai NU Dan Politik (Keterlibatan Kiai NU Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)

and 3) concluding. The results of this study indicate that 1) The majority of NU Jember kiai interpret politics as a struggle to achieve the benefit of the people. Politics is also interpreted as an effort to protect the aqidah of the people from opposing ideologies or ideologies. 2) There are two motivations that encourage the involvement of the Jember NU kiai in practical politics, namely dakwah orientation and ideological orientation. 3) The form of involvement of NU kiai in practical politics (2019 Presidential Election) in Jember Regency is carried out in several ways, including providing support through circulars/announcements, consolidation of fellow kiai and direct instruction to students, guardians of santri, a board of teachers/asatidz, alumni and pesantren sympathizers.

**Keywords:** Kiai, Politic, NU

### PENDAHULUAN

Kelahiran NU pada tahun 1926 tidak lain muncul karena keprihatinan akan upaya penghapusan kearifan lokal dalam keberagaman masyarakat. Pada level internasional, Komite Hijaz diinisiasi sebagai upaya untuk melindungi kepentingan bersama umat Islam dari ancaman gerakan Wahabisme di Saudi Arabia. Sehingga NU sebagai gerakan sosial kemasyarakatan berupaya “menyelamatkan” tradisi pribumi yang menjadi cara beragama masyarakat di Indonesia. NU memiliki visi untuk mengembangkan dan memelihara Islam Ahlussunnah wal Jama’ah yang dianut oleh kebanyakan ulama Islam di Indonesia. Dalam persoalan amaliyah sehari-hari, faham keagamaan NU lebih merujuk kepada Imam Syafi’i.

Di samping itu, NU memiliki peran untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa.<sup>1</sup> Di saat sebagian organisasi Islam menginginkan Islam menjadi dasar negara, NU menjadi pembuka bagi bersemainya pandangan tentang negara nasional (*national state*).<sup>2</sup>

Berangkat dari peran itulah NU secara otomatis menempatkan warganya untuk tetap aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai *jam’iyyah* secara organisatoris NU tidak terikat dengan organisasi politik manapun. Setiap warga NU adalah warga negara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh undang-undang. Hak politik digunakan secara baik dan bertanggung jawab, sehingga dengan demikian dapat menumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum, dan mampu mengembangkan musyawarah dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi bersama.

Dalam kancah politik nasional, NU tidak dipandang hanya sebagai organisasi sosial keagamaan, lebih dari itu, NU merupakan satu dari beberapa organisasi yang hadir dan turut menentukan konstelasi politik tanah air. Hal ini tidak terlepas dari sejarah panjang dan berliku tentang NU dan ke-Indonesia-an. Entah itu dimaknai sebagai persoalan politik yang beririsan

---

<sup>1</sup> A. Khamami Zada, *Nabdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), ix.

<sup>2</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Babsul Masa’il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004), vi.

dengan keagamaan, nasionalisme, budaya, dan sebagainya. Karena itu, tidak heran jika dalam setiap ajang kontestasi pemilihan umum baik dalam skala nasional maupun daerah peran, posisi, dan 'kiblat' NU atas partai politik menjadi perhatian utama oleh banyak kalangan. Argumen tersebut didasarkan pada NU yang memiliki modal massa yang berlimpah sekaligus solid. Basis *nabdliyyin* ini menjadi semacam "senjata" yang dimiliki NU.

Di kalangan warga NU sendiri, sosok kiai tidak bisa dikesampingkan. Kiai dianggap figur yang memiliki pengetahuan keagamaan yang lebih baik dibanding masyarakat pada umumnya. Kiai juga mempunyai posisi strategis dalam strata sosial masyarakat. Posisi sentral itu terkait dengan kedudukan Kiai sebagai orang yang ahli agama dan memiliki kharismatik. Dalam kehidupan pesantren dan masyarakat, kiai memiliki pengaruh yang sangat besar. Apa saja petuah seorang kiai bisa dipastikan akan diikuti oleh santri dan masyarakat.

Suara kiai bahkan santri selalu diperebutkan bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya meraup simpati dari kalangan Islam yang menjadi pengikut setia kiai, banyak partai politik yang menempatkan kiai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai dengan harapan dapat menjadi pendulang suara dalam pemilu.

Kiai yang awalnya hanya seorang pengasuh pesantren dan panutan masyarakat dalam persoalan agama, pada akhirnya pun terlibat dalam persoalan politik praktis. Hal ini tak lepas dari aset besar yang dimiliki oleh seorang kiai, yang berupa kharisma, wibawa, pengetahuan agama, dan massa yang cukup besar baik di lingkungan NU, pesantren dan masyarakat.

Kiai yang mempunyai pengaruh tersebut kemudian memiliki posisi strategis dalam konstalasi politik saat ini. Banyak kiai yang terlibat dalam politik praktis, baik langsung maupun tidak langsung. Kiai langsung terlibat dalam politik, seperti menjadi pengurus partai politik, juru kampanye, ataupun sebagai anggota legislatif. Adapun secara tidak langsung, Kiai hanya memberi dukungan kepada partai politik maupun dukungan kepada calon baik legislatif maupun eksekutif.

Keterlibatan kiai dalam politik praktis bukan fenomena yang baru lagi dan sampai saat ini selalu mengundang perdebatan antara kelompok yang setuju dengan sikap kiai tersebut dengan kelompok yang menentang keterlibatannya kiai dalam aktifitas politik. Bagi kelompok pertama, bagaimanapun juga kiai memiliki hak dan aspirasi politik sebagai seorang warga negara, sehingga sah-sah saja jika kiai ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sedangkan bagi kelompok kedua, kiai yang terjun dalam politik dianggap lebih banyak mendatangkan *mudharat* dibandingkan dengan manfaat yang didapat.

Berangkat dari fenomena sebagaimana di atas, kajian tentang dinamika dan kiprah politik kiai selalu menarik untuk terus dikaji dari berbagai sudut pandang berbeda, lebih-lebih jika

## Kiai NU Dan Politik (Keterlibatan Kiai NU Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)

dikaitkan dengan kondisi riil perkembangan politik di tanah air. Berkaitan dengan penelitian ini dalam kontestasi Pilpres 2019, beberapa kiai NU struktural maupun non struktural di Jember terlibat aktif dalam memenangkan pasangan calon no urut 1, yaitu Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf pun secara bergantian hadir ke beberapa pesantren di Jember. Satu bulan menjelang *coblosan* (25 Maret 2019) Jokowi mengunjungi PP. Nurul Islam Antirogo Sumbersari untuk melakukan konsolidasi bersama para kiai-kiai NU di pesantren asuhan KH. Muhyiddin Abdusshomad tersebut. Sebelumnya, (27 September 2018) Ma'ruf Amin yang datang ke Jember dan berkunjung ke beberapa pesantren, diantaranya PP. Nurul Islam Antirogo Sumbersari, PP. Raudhatul Ulum Sukowono, PP. Al-Qodiri Patrang dan PP. Asshiddiqi Putra Kaliwates.

Tentu saja kunjungan silaturahmi "politik" tersebut dilakukan karena kekuatan kiai yang dianggap mampu menggerakkan santri, wali santri, alumni dan simpatisan untuk mendulang suara. Sosok kiai sebagai pengasuh pesantren tidak bisa dipandang sebelah mata dalam memobilisasi massa untuk mendulang suara. Dalam konteks ini, motif dan tujuan Kiai terlibat aktif dalam kontestasi pilpres tersebut menjadi menarik untuk diungkap. Lebih-lebih kabupaten Jember termasuk salah satu kabupaten di tapal kuda yang memiliki basis massa NU cukup kuat. Warga *nahdliyyin* di kabupaten ini kerap kali mengikuti ijtihad politik seorang kiai. Berangkat dari realitas inilah, penelitian ini ingin mengungkap makna politik dalam perspektif kiai NU Jember, serta motivasi dan bentuk keterlibatan mereka dalam kontestasi Pilpres 2019.

### KILAS SEJARAH KETERLIBATAN NU DALAM POLITIK

Jika dilihat dari tujuan didirikannya, NU sebenarnya merupakan wadah perjuangan politik para ulama tradisional untuk tetap meneguhkan eksistensi sikap politis mereka dalam beragama di tengah maraknya gerakan pembaharuan keagamaan.<sup>3</sup> NU dijadikan alat perjuangan politik disebabkan keyakinan bahwa Islam memberikan ruang bagi umatnya untuk ikut terlibat dalam kehidupan politik. Sebab itulah mereka memahami bahwa berpolitik pada dasarnya adalah bagian dari perintah agama.<sup>4</sup>

Abdul Gaffar Karim menegaskan bahwa sejak awal NU telah memiliki potensi politik yang tidak bisa dianggap kecil.<sup>5</sup> Hal ini terbukti ketika Indonesia berada dalam masa kolonialisme semangat perlawanan datang dari para kiai. Mereka mengobarkan semangat nasionalisme untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda.

---

<sup>3</sup> Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Bisma Satu Printing, 1999), 46.

<sup>4</sup> Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif* (Jakarta: LP3ES, 2004), 90.

<sup>5</sup> A. Ghaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 1995), 50.

Dalam konteks ini, Shalahuddin Wahid menjelaskan bahwa lahirnya NU dipengaruhi oleh motif keagamaan dan kiprah perjuangannya mengambil bentuk gerakan kultural. Pada perkembangan berikutnya, kiprah perjuangan NU mengalami beberapa perubahan, dari gerakan kultural murni menjadi gerakan politik, sebelum akhirnya kembali ke watak dasarnya, yaitu gerakan kultural keagamaan. Ketika terjadi perjuangan politik melawan penjajahan Belanda makin banyak melibatkan golongan-golongan di tanah air, terjadi banyak kontak antara tokoh-tokoh NU dengan berbagai kalangan. Hal itu, antara lain yang ikut mempengaruhi terjadinya keterlibatan (kiai) NU dalam perjuangan politik dalam bentuk gerakan politik.<sup>6</sup> Jadi, dapat dipahami bahwa akar historis keterlibatan kiai NU dalam kegiatan politik dimulai jauh ke belakang, yakni ke masa-masa penjajahan.<sup>7</sup>

Menurut Slamet Effendi Yusuf, sejak awal tahun 1940-an, muncul generasi baru dalam lingkungan NU yang memiliki watak sebagai politisi praktis. Mereka memiliki bakat dan potensi yang kuat sebagai politisi, dan dengan jasa NU, mereka mencoba meraih puncak karier politik. Sebaliknya, NU mendukung mereka antara lain karena ikatan geneologis di satu pihak, dan di pihak lain juga karena adanya harapan NU terhadap mereka untuk memperlancar dan mengefektifkan aktivitas NU di bidang kultural, social, pendidikan, dan keagamaan.<sup>8</sup>

Gerakan politik NU makin intensif, lebih-lebih setelah kekuasaan Belanda secara terus menerus dipakai untuk mengganggu hal-hal yang dipandang sebagai prinsip dari kehidupan kebangsaan dan keagamaan. Kondisi ini mendatangkan kesadaran baru di kalangan NU untuk segera mengakhiri kekuasaan Belanda dengan berbagai cara, termasuk melalui gerakan politik. Pada waktu itu, gerakan-gerakan politik kiai-kiai NU terlihat dengan jelas bahwa arah gerakan politiknya bersifat makro atau politik kebangsaan. Politik kebangsaan kiai NU ini semakin jelas kalau memahami pernyataan KH. M. Dachlan bahwa perjuangan anti penjajah merupakan asal-usul NU.<sup>9</sup>

Kemudian, pada tahun 1973 saat para kiai NU bersama organisasi Islam yang lain mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Namun, MIAI yang terkenal anti kolonial dibubarkan pada tahun 1943. Kemudian dibentuklah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai ganti MIAI. Pada perkembangan berikutnya ketika peran elit NU yang duduk di Majelis Syuro mulai terpinggirkan, sementara kaum modernis semakin menguasai partai,

---

<sup>6</sup> Salahuddin Wahid, *Menggagas Peran Politik NU* (Jakarta : Pustaka Indonesia Satu, 2002), 33.

<sup>7</sup> Ahmad Warid, "Fiqh Politik NU; Studi Pergeseran dari Politik Kebangsaan ke Politik Kekuasaan," *al-Syir'ah*, Vol. 1 (2009): 217.

<sup>8</sup> Slamet Effendi Yusuf, *Dinamika Kaum Santri* (Jakarta: Radjawali Press, 1985), xvi.

<sup>9</sup> Ahmad Warid, "Fiqh Politik NU", 218.

## Kiai NU Dan Politik (Keterlibatan Kiai NU Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)

terutama setelah dikuasai tokoh Persis, Muhammad Natsir, maka pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan mendirikan Partai NU.<sup>10</sup>

Pada pemilu 1955, Partai NU meraup suara yang cukup signifikan. Peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi, satu peringkat di atas PKI. Sementara pada pemilu pertama di era orde baru tahun 1971, NU berada di peringkat kedua dengan perolehan suara 18,7 % setelah Golkar yang menang mutlak dengan 62,8%. Pada tahun 1973 ketika terjadi kebijakan fusi, NU bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama tiga partai Islam lainnya (Parmusi, PSII dan Perti). NU memegang peranan penting di PPP, hampir semua jabatan strategis dipegang oleh tokoh NU, seperti KH. Idham Khalid dan KH. Bishri Syamsuri.

Namun ketika Jaelani Naro memegang kendali PPP, NU mulai terpinggirkan sehingga menyebabkan NU memikirkan kembali eksistensinya di PPP. Puncaknya, pada tahun 1984, NU keluar dari PPP dan menyatakan kembali ke "*khittah*". NU menegaskan bahwa mereka tidak terikat dengan PPP dan membebaskan anggotanya untuk menyalurkan pilihan politiknya ke Golkar maupun PDI.

Berakhirnya era orde baru, menjadi awal babak baru perpolitikan di Indonesia. Rakyat memiliki kebebasan berpendapat secara leluasa dan menyuarakan aspirasi politiknya. Beberapa kalangan berupaya mendirikan partai politik sebagai wadah untuk menyalurkan informasi, tak terkecuali NU. Meski tidak sedikit dari kalangan Kiai menolak ide tersebut, namun pada akhirnya didirikanlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi saluran politik warga *nabdliyyin*.<sup>11</sup>

### “KHITTAH NU” DALAM PERDEBATAN

KH. Wahab Hasbullah menghimbau warga NU saat Mukhtamar NU ke 25 di Surabaya agar kembali ke "*Khittah*" 26. Adapun maksud dari "*Khittah* 26" adalah merujuk pada garis, nilai-nilai dan model perjuangan NU yang ditetapkan pada tahun 1926 pada saat NU didirikan. Garis haluan perjuangan NU difokuskan pada gerakan sosial-keagamaan. Hanya saja, garis haluan tersebut mengalami perubahan ketika NU pada akhirnya ikut terlibat dalam politik praktis.

Sementara itu, maksud dan tujuan NU kembali ke "*Khittah*" 26 menurut KH. Muchith Muzadi adalah sebagai berikut : (1) untuk memulihkan kedudukan NU dan ulama menjadi panutan semua lapisan kaum muslim Ahlusunnah waljama'ah, (2) untuk melepaskan NU dari keterikatan dengan politik praktis, agar mampu menggarap program- program yang bermanfaat bagi agma, kaum *nabdliyyin*, dan masyarakat, dan (3) untuk menegaskan hakekat identitas NU dan konsekuensinya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Muhibbin, *Politik Kiai vs Politik Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 60.

<sup>11</sup> Muhibbin, *Politik Kiai & Politik Rakyat*, 64.

<sup>12</sup> Abdul Muhih Muzadi, "Masa-masa Ujian Berat bagi NU," *Aula*, No.11 (Nopember 1995).

Sedangkan KH. Sahal Mahfudh, menjelaskan uraian kandungan dari *kbittab* 1926, di antaranya adalah bahwa masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat yang mempunyai kesadaran pendidikan, kesehatan, berdisiplin social, solidaritas sosial, keamanan dan utamanya kesadaran melaksanakan syari'at Islam, akan terwujud sedemikian rupa dalam kondisi dinamis.<sup>13</sup>

Usulun kembali "*kbittab*" tersebut muncul sebab banyak kritik kepada NU yang muncul dari kalangan internal NU sendiri. Mereka menilai bahwa elit-elit NU sudah tidak lagi fokus mengurus umat, tapi terlibat terlalu jauh dalam politik praktis. Mereka akhirnya menyuarakan untuk kembali kepada "*kbittab*" yang menjadi pondasi dan garis haluan perjuangan NU.

Sementara itu, Feillard memaparkan beberapa alasan yang membuat NU harus menarik diri dari dunia politik saat itu. *Pertama*, ada tekanan yang diderita para pegawai negeri/para pengusaha yang tergantung pada administrasi untuk mendapatkan bagian tender pekerjaan umum. *Kedua*, ketidakpuasan terhadap pengabaian tugas-tugas utama yang bersifat sosial/pendidikan. Pengabaian jangka panjang dapat membuat NU kehilangan akarnya dalam masyarakat. Ketidakpuasan juga banyak muncul karena kepengurusan Idham Chalid yang suka merahasiakan hal yang mestinya diketahui oleh umum dan tidak memberikan dukungannya pada cabang-cabang daerah yang menderita tekanan dari pemerintah sehingga dalam beberapa kasus menyebabkan hancurnya (cabang tersebut).<sup>14</sup>

## TERMINOLOGI POLITIK DAN KIAI

Politik berasal dari bahasa Inggris, *politic* yang berarti menunjukkan sikap pribadi atau perbuatan.<sup>15</sup> Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.<sup>16</sup> Kata ini berasal dari kata latin, *politicus* dan bahasa yunani, *politico* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata ini juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* atau kota. *Politic* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti yaitu segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga digunakan sebagai nama dari sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.

Adapun jika dilihat dari perspektif makna kamus Arab modern, istilah politik biasanya diterjemahkan dengan *siyasah*. Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu* (mengendalikan, mengemudi, mengatur dan lain-lain). Sedangkan secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf

---

<sup>13</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 15.

<sup>14</sup> Andree Feillard, *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: LKiS, 1997), 210.

<sup>15</sup> Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 34.

<sup>16</sup> M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1981), 437.

## Kiai NU Dan Politik (Keterlibatan Kiai NU Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)

mengartikan politik dengan undang-undang yang mengatur dan memelihara ketertiban untuk kemashlahatan bersama.<sup>17</sup>

Sementara itu, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kiai biasanya digunakan untuk sebutan bagi para alim ulama Islam.<sup>18</sup> Kata kiai ini juga digunakan untuk sebutan seorang tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni dalam persoalan agama. Karena kemampuannya inilah dalam masyarakat Jawa pada khususnya, sosok kiai mendapatkan pengakuan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam pemakaiannya, kata kiai dalam bahasa Jawa digunakan untuk; 1) benda atau hewan yang dikeramatkan, seperti kiai Plered (tombak), kiai Rebo dan kiai Wage (gajah di kebun binatang GembiraLoka Yogyakarta), 2) orang tua pada umumnya, 3) orang yang memiliki keahlian dalam agama Islam dan menjadi pimpinan pesantren serta mengajar kitab-kitab klasik kepada para santrinya.<sup>20</sup>

Sedangkan secara terminologis menurut Manfred Ziemmek kiai adalah pendiri dan pemimpin sebuah pesantren sebagai muslim terpelajar yang membaktikan hidupnya “demi Allah”, mendalami dan menyebarluaskan ajaran Islam melalui kegiatan pendidikan.<sup>21</sup>

Penggunaan istilah kiai sendiri hanya khas berlaku dalam kultur masyarakat Jawa. Dalam khazanah intelektual Jawa, istilah kiai diidentikkan dengan ulama. Sementara di daerah lain mempunyai istilah yang berbeda-beda, misalnya *ajengan* untuk masyarakat Sunda, *bendere* untuk masyarakat Madura, *buya* untuk masyarakat Sumatera Barat, *topanrita* untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan *tuan guru* untuk masyarakat Lombok.<sup>22</sup>

### KIAI SEBAGAI ELIT POLITIK

Meskipun tujuan utama pendirian NU adalah untuk mengembangkan dan menegakkan paham Ahlussunnah wal Jama'ah, NU terkadang juga dipergunakan sebagai alat perjuangan politik. Pada perkembangannya keterlibatan NU dalam politik tampaknya tidak dapat dihindari, utamanya ketika bangsa Indonesia membutuhkan perjuangan NU. Posisi kiai yang merupakan pemimpin NU dan pemimpin pesantren, mau tidak mau “harus” terlibat dalam politik praktis.<sup>23</sup>

Sejak dahulu kiai sudah terlibat dalam masalah politik, baik dalam pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, maupun pada masa reformasi, meskipun dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda dalam setiap periodenya. Kiai mempunyai andil yang cukup besar dalam proses

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syari'ah* (Kairo: Darul Ansar, 1997), 4.

<sup>18</sup> Purwodarmino, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 505.

<sup>19</sup> Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 20.

<sup>20</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 55.

<sup>21</sup> Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri: Dari Kyai Menjadi Bupati* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 2.

<sup>22</sup> Muhibbin, *Politik Kiai vs Politik Rakyat*, 45.

<sup>23</sup> Endang Turmudi, *Perselingkuban Kiai Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 147.

kontestasi politik di Indonesia. Ada keterkaitan yang erat antara kiai pesantren, NU, dan dunia politik.

Relasi kiai dengan dinamika politik lokal merupakan kajian menarik dalam lanskap penelitian politik Islam di Indonesia. Seorang kiai sendiri tidaklah dimaknai sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang keagamaan saja, akan tetapi bagaimana menelaah kiai sebagai pembentuk ruang kuasa sosial politik dalam kemasyarakatan.

Menurut Zamakhsyari Dhofier sosok kiai merupakan tokoh sentral dalam kehidupan sebuah pesantren. Dengan integritas kepribadian, wibawa keilmuan dan kharisma kepemimpinannya, seorang kiai menjadi panutan bagi seluruh anggota keluarga, bagi para santri dan bagi komunitas di lingkungan dan di luar pesantrennya.<sup>24</sup>

Ketokohan kiai tersebut telah memberikan ruang baginya untuk ikut andil dalam membina, mengembangkan, dan menciptakan kondisi kehidupan negara dengan aman, tenang, dan berkeadilan. Aktivitas moral, pendidikan dan politik yang dilakukan kiai dengan mudah menjadi *uswatun hasanah* bagi para santri dan komunitas di lingkungannya. Model keteladanan para kiai ini ternyata juga berimbas dalam kehidupan politik.

Melalui berbagai peran yang diembannya baik dalam bidang keagamaan dan bidang sosio-kultural, kiai kemudian tampil sebagai patron yang memiliki kekuasaan hierarkis atas masyarakat. Ditinjau dari segi ilmu politik, kiai merupakan aktor politik yang mempunyai sumber daya politik berbasis kharismatik dan tradisional yang memungkinkan kiai membentuk sikap atau preferensi politis tertentu dalam struktur sosial masyarakat di sekitarnya.<sup>25</sup>

Hal tersebut bisa tercermin dari kasus pemilihan kepala daerah di berbagai daerah dimana kandidat kepala daerah beserta wakilnya sowan ke pondok pesantren untuk meminta restu politik sang kiai untuk maju dalam pemilukada di daerahnya. Selain itu, kiai juga sering dimintai pendapatnya oleh kepala daerah dalam mengambil berbagai keputusan-keputusan penting dalam pemerintahannya. Restu maupun pendapat kiai secara politis dimaknai sebagai rujukan sah bagi kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya.

Secara sosiologis, kiai memiliki peran yang istimewa di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan santri. Kiai dihormati dan petuah-petuahannya dipatuhi. Dilihat dari aspek ekonomi mereka beragam, meski pada umumnya berasal dari kelompok bangsawan kaya yang memiliki aset kekayaan seperti tanah yang luas. Akumulasi dari status sosial ditopang kekayaan dan ilmu pengetahuan yang mumpuni menjadikan kiai sebagai pemimpin kharismatik yang disegani.

---

<sup>24</sup> Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 56.

<sup>25</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Politik Santri: Cara Merebut Hati Rakyat* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 55.

## Kiai NU Dan Politik (Keterlibatan Kiai NU Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)

Sebagai elit politik, kiai mempunyai kekuatan penting dalam kehidupan politik Indonesia. Kiai memiliki pengaruh yang signifikan dalam pergerakan masyarakat dan pembangunan. Posisi menonjol kiai akan lebih tampak ketika partai politik secara intens memasuki pesantren sebagai basis kultural kiai.

Dalam tradisi kaum *nahdliyin*, kiai juga memiliki tempat yang istimewa. Pendapatnya menjadi rujukan utama dalam proses pengambilan keputusan, tidak saja dalam masalah agama tapi juga masalah sosial dan politik. Karena itulah, dalam struktural organisasi NU, kiai selalu ditempatkan di posisi tertinggi, *syuriah*. Pada titik inilah, kiai memainkan peran-peran strategis dalam lini kehidupan sosial politik di Indonesia.

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan beberapa alasan, pertama, yang hendak dikaji adalah makna dibalik tindakan individu yang memiliki strategi bertindak yang tepat bagi dirinya sendiri sehingga memerlukan pengkajian yang mendalam. Kedua, penelitian kualitatif memberikan peluang suatu kajian secara mendalam terhadap objek (fenomena) tentang keyakinan, kesadaran, dan tindakan yang ada dalam setiap individu. Ketiga, penggunaan metode ini akan memberi peluang melakukan interpretasi agar mendapatkan pemahaman yang holistik,<sup>26</sup> fenomena yang dikaji merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dalam konteks penelitian ini keterlibatan kiai dalam politik praktis tentu bukanlah tindakan yang diakibatkan oleh satu atau dua faktor, melainkan sekian banyak faktor yang saling berkait.

Dalam konteks ini, peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dibalik fenomena yang berhasil direkam. Misalnya, menggali tentang makna politik perspektif kiai NU Jember, motivasi dibalik keputusan kiai NU mendukung salah satu pasangan calon dan bentuk dukungan yang diberikan. Karenanya, penelitian ini difokuskan kepada individu pelaku politik, yaitu kiai itu sendiri.

Sementara itu, jenis penelitian ini adalah penelitian etnografis-politis, yang mempelajari secara mendalam dan holistik salah satu fenomena sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat suatu daerah tertentu. Esensi dari penelitian ini untuk memahami secara mendalam makna sebuah fenomena dalam suatu lingkungan sosial-budaya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, 9th Edition (London: Sage Publication, 2000).

<sup>27</sup> J. Clifford, "Introduction: Patrial Truths", dalam J. Clifford and Marcus, G.E (ed.), *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography* (Berkeley: University of California Press, 1986), 6-7.

Selanjutnya hasil temuan akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup>

Penelitian tentang keterlibatan Kiai NU dalam politik ini difokuskan terhadap Kiai NU yang berdomisili di Kabupaten Jember Jawa Timur. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah kiai-kiai NU struktural yang terlibat dalam kontestasi politik ajang Pilpres 2019.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara serta dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>29</sup> Instrumen wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dengan didasarkan atas masalah dalam penelitian.

Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Data dokumen berupa informasi yang lebih spesifik tentang keterlibatan kiai NU Jember dalam politik, misalnya dari surat-surat, foto-foto, pertemuan, dan diskusi formal maupun informal.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu selama proses pengumpulan data di lapangan dan setelah data tersebut terkumpul.<sup>30</sup> Secara umum analisa data dilakukan dengan langkah; 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) penarikan kesimpulan<sup>31</sup>, yang tahapan-tahapannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahap analisis data dimulai dengan mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan. Dilanjutkan dengan membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan informan dengan melakukan *horizontalizing*, yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama.

Kemudian pernyataan yang tidak relevan dengan bahasan utama dan pernyataan yang bersifat *repetitif* (tumpang tindih) dihilangkan. Pernyataan tersebut lalu dikumpulkan ke dalam unit makna dan ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.

---

<sup>28</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 2017), 54.

<sup>29</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

<sup>30</sup> Sudarsono, *Beberapa Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1992), 326.

<sup>31</sup> Miles, M. B dan Huberman, A.M, *Qualitative Data Analysis* (terjz). Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1994), 20.

## Kiai NU Dan Politik (Keterlibatan Kiai NU Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)

Selanjutnya mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan *textural description* (mengenai fenomena yang terjadi pada responden) dan *structural description* (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi). Lalu memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang dikaji dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.

### PEMBAHASAN

#### Politik dalam Perspektif Kiai NU Jember

Keterlibatan kiai dalam politik praktis sampai saat ini selalu mengundang perdebatan antara kelompok yang setuju dengan sikap kiai tersebut dengan kelompok yang menentang terlibatnya kiai dalam aktifitas politik. Bagi kelompok pertama, bagaimanapun juga kiai memiliki hak dan aspirasi politik sebagai seorang warga negara, sehingga sah-sah saja jika kiai ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sedangkan bagi kelompok kedua, kiai yang terjun dalam politik dianggap lebih banyak mendatangkan *mudharat* dibandingkan dengan manfaat yang didapat.

Dalam pandangan NU, politik menjadi sarana untuk memperbaiki negara dengan prinsip wawasan kebangsaan. Karenanya, politik kebangsaan NU didasarkan kepada moral keagamaan. Pada masa kolonial, terjun ke dunia politik merupakan kewajiban agama, untuk mempertahankan harkat dan martabat negara yang diinjak-injak oleh kaum penjajah secara lalim. Dalam konteks ini kiai Imam Habibul Haramain, pengasuh PP. Al-Hidayah Silo, menuturkan:

“Politik itu wajib, sebab ajaran agama tidak akan bisa dijalankan dengan *kaffah* jika tidak ditopang oleh kekuasaan (politik), kalau kita membaca sejarah, kita bisa melihat bagaimana dulu sebelum Indonesia merdeka, kiai-kiai NU turut berperan aktif dalam merumuskan kebijakan negara, bahkan NU pernah menjadi partai politik, setelah akhirnya muncul yang namanya “*khittab*” 26 itu.”<sup>32</sup>

Sebenarnya, kembalinya NU ke “*khittab*” 1926 diputuskan melalui Munas Alim Ulama NU No. II/MAUNU /1404/1983, kemudian dikuatkan lagi dalam hasil keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo XXVII No. 02/MNU/27/1984. Keputusan ini muncul disebabkan oleh carut-marutnya etika politik yang dimainkan kiai-kiai NU. Sehingga dipandang perlu untuk mengembalikannya sebagai organisasi sosialkeagamaan yang tidak terkaitsedikitpundengan organisasi politik.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Imam Habibul Haramain di kediamannya, PP. Al-Hidayah Silo, 10 September 2019.

Namun demikian, menurut Gus Ghalban, Pengasuh PP. Zainab Shiddiq, sekaligus Majelis Pengasuh PP. Darus Sholah Tegal Besar, "*kbittab*" itu bukan berarti NU tidak boleh sama sekali berpolitik. Adanya rumusan "*kbittab*" tidak boleh dilepaskan dari *asbabul wurud*-nya (sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya). Jika "*kbittab*" NU dijadikan sebagai alasan agar NU tidak terlibat sama sekali dalam politik praktis, maka hal ini justru bertentangan dengan sejarah berdirinya NU yang memang tidak bisa dilepaskan dari dunia politik, baik dalam konteks politik kebangsaan, politik kerakyatan maupun politik praktis. Lebih jelas Gus Ghalban menegaskan:

"Kalau "*kbittab*" itu diartikan NU tidak boleh berpolitik, maka yang rugi nanti adalah warga NU sendiri. Apalagi kalau sampai pemimpin yang berkuasa itu berbeda ideologinya dengan NU. Karena itu kiai ya juga harus turut ambil bagian dalam dunia politik."<sup>33</sup>

Sementara itu, menurut kiai Rosyidi Baihaqi, Pengasuh PP. Miftahul Ulum Kalisat, keterlibatan kiai NU dalam politik akan semakin mengokohkan peran ulama di tengah-tengah masyarakat. Kiai tidak hanya bertugas mengurus persoalan agama atau akhirat saja, namun juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama terutama dalam mendidik dan mendampingi masyarakat berkaitan persoalan politik.

Dalam perspektif kiai Rosyidi, melalui mesin politik kiai bisa mengawal aqidah umat dari faham atau ideologi yang berseberangan dengan NU. Ketika ditanya terkait makna politik, beliau menjawab bahwa politik tidak selalu soal kekuasaan, tapi yang lebih penting adalah soal aqidah. Aqidah bisa dijaga salah satunya dengan instrumen politik."<sup>34</sup>

Senada dengan kiai Rosyidi, kiai Misbahussalam, Wakil Ketua Tanfidziah PCNU Jember, juga beranggapan bahwa politik itu bukan hanya persoalan kekuasaan dan jabatan. Tapi politik adalah perjuangan untuk mewujudkan kemashlahatan umat, baik secara jasmani maupun rohani.<sup>35</sup>

Sebenarnya, membincang makna politik perspektif kiai, tidak bisa dilepaskan dari kajian tentang hubungan agama dan politik (negara). Agama tidak hanya mengajarkan tentang keyakinan dan sistem peribadatan, namun juga mengatur sistem hubungan manusia dengan manusia dalam konteks kehidupan sosial. Setidaknya terdapat tiga kecenderungan pemikiran terkait relasi agama dan politik ini;

*Pertama*, pemikiran yang menganggap bahwa agama dan negara (baca: politik) tidak bisa dipisahkan. Wilayah agama juga mencakup wilayah negara, dalam bahasa lain negara merupakan

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Gus Ghalban Aunirrahman di kediamannya, PP. Zainab Shiddiq Talangsari, 15 September 2019.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Rosyidi Baihaqi di kediamannya, PP. Miftahul Ulum Kalisat, 18 September 2019.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Misbahussalam di Kantor Baznas Jember, 8 Oktober 2019.

## Kiai NU Dan Politik (Keterlibatan Kiai NU Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)

lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Diantara tokoh yang menganut paham ini adalah Al-Maududi, Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha.

*Kedua*, pemikiran yang menganggap bahwa hubungan antara agama dan negara saling mengisi dan menguntungkan. Dalam konsep ini kepemimpinan negara dianggap meneruskan *risalah* kenabian dalam rangka menertibkan dunia dan menjaga agama Tuhan. Tokoh yang menganut paham ini adalah Al-Mawardi dan Abu Hamid al-Ghazali.

*Ketiga*, pemikiran yang menganggap bahwa hubungan agama dan negara bersifat sekuleristik, artinya agama dan negara berdiri sendiri-sendiri. Di antara tokoh yang mengusung ideologi ini adalah Ali Abd Raziq.<sup>36</sup>

Terkait dengan keterlibatan kiai-kiai NU dalam dunia politik praktis, tidak mudah untuk diidentifikasi mereka masuk ke dalam tipologi pemikiran yang mana dari tiga pemikiran di atas. Namun setidaknya jika melihat sejarah berdirinya NU dapat dikatakan bahwa para kiai termasuk kelompok yang akomodatif. Hal ini ditunjukkan -misalnya- saat KH. Wahid Hasyim menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa. Contoh lain adalah saat NU menolak kelompok Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosuwirjo yang menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Justru pada tahun 1953, para tokoh NU memberikan predikat "*waliyul amri al-dharuri bi al-syaukah*" kepada Soekarno.<sup>37</sup>

Agaknya pemikiran akomodatif inilah yang menjadi salah satu faktor keberkelindanan hubungan kiai NU dan politik praktis. Mereka tidak menganggap bahwa agama hanya mengurus persoalan aqidah dan *ubudiyah*, melainkan juga mengatur persoalan *mu'amalah* (sosial) yang di dalamnya terdapat persoalan berkaitan dengan konsep negara. Gus Firjaun Barlaman, putera KH. Ahmad Shiddiq, menuturkan:

"Politik itu memang bagian dari agama, agama mengatur segala bidang, salah satunya politik, warga NU harus tetap berpolitik. Karena ketika NU tidak memanfaatkan hak-hak politiknya maka tentu itu akan dikuasi orang lain."<sup>38</sup>

Menurut Gus Firjaun, sejak awal Islam tidak bisa dilepaskan dari politik. Sejarah mencatat bagaimana rumusan ajaran agama dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Madinah tidak terlepas dari pergumulan politik. Agama dan politik menjadi satu, saling berhubungan satu sama lain. Dalam konteks ini pada akhirnya muncul istilah *al-din wa al-daulah* (agama dan negara).

Senada dengan Gus Firjaun, kiai Mahmudul Huda, Wakil Katib Syuriah PCNU Jember, juga

---

<sup>36</sup> Fathor Rahman, *Singgasana Politik Kiai Madura* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 23-25.

<sup>37</sup> Fathor Rahman, *Singgasana Politik Kiai Madura*, 27.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Gus Firjaun Barlaman di kediamannya, PP. Asshiddiqi Putra (ASTRA), 22 September 2019.

memiliki perspektif yang sama. Menurutnya, prinsip dasar agama terkait politik adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jika melihat tujuan utama disyariatkannya sebuah hukum dalam agama Islam, sebenarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik itu kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.<sup>39</sup>

Sementara itu kiai Dawam Wahid, Wakil Rais Syuriah PCNU Jember, menganggap bahwa politik adalah salah satu cara strategi berdakwah. Ulama memiliki tugas pokok untuk berdakwah, mengajak umat ke jalan yang benar. Tugas dakwah akan menjadi mudah jika didukung dengan mesin kekuasaan.<sup>40</sup>

Argumentasi kiai Dawam tersebut linier dengan Pasal 6 AD/ART NU tahun 2004, disebutkan bahwa NU melaksanakan usaha-usaha dalam beberapa bidang, diantaranya bidang agama, pendidikan, sosial, ekonomi dan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, NU mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa.<sup>41</sup>

### **Motivasi Keterlibatan Kiai NU dalam Politik Praktis di Kabupaten Jember**

Secara umum banyak tesis yang mengurai orientasi keterlibatan kiai dalam dunia politik praktis, baik motif tersebut berasal dari faktor internal, yaitu individu kiai sendiri, lembaga pesantren atau berasal dari faktor eksternal. Usaha untuk mengungkap motif dibalik keterlibatan kiai dalam politik tidaklah mudah, sebab akan bertemu dengan subjektifitas seorang kiai terkait alasan keterlibatannya dalam dunia politik.

Ada tiga model tipologi politik NU, yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan dan politik praktis. Namun, meski ada tiga tipologi sebagaimana tersebut, garis perjuangan politik NU sebenarnya bermuara kepada tujuan awal didirikannya NU, yaitu dalam rangka menjaga dan melestarikan ideologi Ahlussunnah wal Jama'ah. Dalam konteks inilah, lembaga pendidikan pesantren dibawah kepemimpinan seorang kiai mengambil peran untuk mengajarkan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah.

Berkaitan dengan keterlibatan kiai NU Jember dalam panggung politik praktis, khususnya dalam momentum Pilpres 2019 lalu, setidaknya ada beberapa motivasi yang mendorongnya, diantaranya adalah:

Orientasi dakwah, tugas kiai sebagai ahli agama yang dituntut untuk selalu mengajak

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Mahmulul Huda di Kantor PCNU Jember, 12 Oktober 2019.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Dawam Wahid di Kantor PCNU Jember, 5 Oktober 2019.

<sup>41</sup> Fathor Rahman, *Singgasana Politik Kiai Madura*, 125.

## Kiai NU Dan Politik (Keterlibatan Kiai NU Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)

kepada kebaikan dan melarang dari keburukan membuat kiai NU Jember turut ambil bagian dalam panggung politik, baik secara aktif maupun pasif. Kiai Rosyidi menuturkan:

“Terlibat dalam politik itu tujuannya adalah dakwah dan mengabdikan diri untuk kepentingan dan kemashlahatan masyarakat, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, kiai yang terlibat dalam politik harus bisa mengakomodir kepentingan rakyat, bisa menjadi tempat bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sebab mereka memiliki kedekatan dengan rakyat dibandingkan politisi lainnya.”<sup>42</sup>

Kiai Rosyidi menganggap bahwa dakwah yang menjadi tugas seorang kiai akan menjadi mudah dan mulus jalannya jika didukung oleh kekuasaan (baca; politik), karena itu keterlibatan seorang kiai baik secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan.

Orientasi politik seperti itulah yang membuat Kiai Rosyidi merestui menantunya, Gus M. Itqon Syauqi maju dalam pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Jember 2019 melalui PKB. Pada akhirnya Gus Itqon lolos dan terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Jember, bahkan dia dilantik menjadi Ketua DPRD Jember periode 2019-2024 setelah PKB menjadi pemenang dalam pemilu dengan memperoleh delapan kursi, dengan total suara di seluruh Jember mencapai 192.178 pemilih.<sup>43</sup>

Sementara itu, Kiai Misbahussalam menuturkan:

“Orang NU itu harus berpolitik agar supaya setiap lini-lini pemerintahan birokrasi itu ditempati oleh orang-orang kita sendiri. Sehingga kebijakan yang dihasilkan akan selaras dengan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah. Jadi kita memperjuangkan kepentingan masyarakat, mendukung program-program pesantren. Kita jadikan posisi setiap lini yang kita duduki sebagai ladang dakwah untuk menyebarkan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah.”<sup>44</sup>

Orientasi dakwah ini menurut Ahmad Patoni, dapat diletakkan dalam pengertian yang luas, yaitu sebagai pengawasan dan evaluasi. Sebab terkadang ditemukan beberapa kebijakan dan aturan yang tidak sejalan dengan prinsip ajaran syari’at. Karena itulah kiai perlu untuk terjun ke dalam politik sebagai control atas kekuasaan yang sewenang-wenang dan menyimpang dari ajaran agama.<sup>45</sup>

Selain itu, berdakwah kepada masyarakat menjadi tugas pokok dan utama seorang kiai sebagai ulama. Salah satu jalan yang dapat membantu mulusnya proses dakwah adalah melalui

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Rosyidi Baihaqi di kediamannya, PP. Miftahul Ulum Kalisat, 18 September 2019.

<sup>43</sup> <https://radarjember.jawapos.com/2019/08/21/Itqon-Dipilih-Jadi-Pimpinan-DPRD/> diakses 8 November 2019

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Misbahussalam di Kantor Baznas Jember, 8 Oktober 2019.

<sup>45</sup> Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren* 158.

jalur politik. Dengan terlibat dalam politik maka medan dan sasaran dakwah menjadi semakin luas. Proses dakwah pun juga menjadi lebih efektif.

Selain orientasi dakwah sebagaimana di atas, ada juga orientasi ideologis, mayoritas kiai NU Jember baik struktural maupun kultural mendukung paslon nomor urut 1, yaitu Jokowi dan Ma'ruf Amin. Sosok Kiai Ma'ruf Amin sebagai representasi dari NU menjadi salah satu alasan munculnya dukungan tersebut. Dalam hal ini Gus Firjaun menegaskan:

“Secara pribadi, saya berpandangan KH. Ma'ruf Amin itu sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, keaswajaannya, dan kalau seusia beliau ini rasanya untuk kepentingan pragmatis sudah tidak ada lagi. Yang beliau pikirkan adalah bagaimana di masa sepuhnya beliau berjuang untuk NU dan ummat. Beliau menguasai ilmu *syari'ah* kemudian memiliki keilmuan agama yang dalam, beda jika masih muda akan mudah tergoda kepemimpinannya. Di samping juga beliau ulama' sepuh juga mempunyai kredibilitas untuk menduduki sebuah jabatan sebagai wakil presiden.<sup>46</sup>

Gus Firjaun menafikan adanya orientasi pragmatis dari majunya Kiai Ma'ruf mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu. Menurutnya, sosok Kiai Ma'ruf diharapkan bisa mengawal aqidah Aswaja (*al-Nabdliyyah*) dari rong-rongan kelompok radikal dan ekstrimis yang saat ini gerakannya begitu massif di negeri ini. Orientasi teologis inilah yang membuat Gus Firjaun memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

Motivasi serupa juga disampaikan oleh Kiai Dawam Wahid, menurutnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo-Sandi banyak didukung oleh kelompok yang secara ideologi berbeda dengan NU, bahkan banyak aktifis eks HTI yang membonceng kepada pasangan Prabowo-Sandi, karena itu secara *all out* dia mengaku memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf dengan alasan faktor ideologis.<sup>47</sup>

Orientasi politik kebangsaan juga menjadi alasan Kiai Imam Haramain ikut terjun dalam dunia politik. Kiai sepuh yang menjadi Dewan Syuro PKB Jember ini menuturkan:

“Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai dimasuki faham-faham dari luar (transnasional) yang secara doktrin aqidah berbeda dengan NU, seperti Salafi/Wahabi, Syi'ah, HTI dan sebagainya, maka dibutuhkan usaha untuk membentengi dan mengimbangi serangan aliran-aliran tersebut dengan cara terjun dalam dunia politik. Karena itulah saya aktif di dunia politik sebagai upaya untuk mempertahankan ajaran

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Gus Firjaun Barlamannya di kediamannya, PP. Asshiddiqi Putra (ASTRA), 22 September 2019

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Dawam Wahid di Kantor PCNU Jember, 5 Oktober 2019.

## Kiai NU Dan Politik (Keterlibatan Kiai NU Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)

Aswaja yang sudah lebih dulu ada dan berkembang di Indonesia.”<sup>48</sup>

Bagi NU, Pancasila sebagai ideologi negara sudah final. Adanya kelompok-kelompok yang ingin menggantikan ideologi negara ini maka secara tegas berhadapan dengan NU. Menurut kiai Misbahussalam warga NU harus berjuang untuk mempertahankan ideologi negara, yang sudah disepakati oleh para pendiri NU. Tidak ada pembahasan untuk tidak menerima dasar ideologi negara yaitu, Pancasila.<sup>49</sup>

Dalam konteks inilah, Gus Ghalban memandang bahwa jika aqidah umat bisa dijaga dengan dan melalui jalan politik, maka tentu saja ulama terjun dalam politik itu wajib, sesuai dengan kaidah “*ma la yatiimu al-wajib illa bihi fahwa wajib*” (perkara yang menjadi penyempurna dari suatu perkara wajib, maka hukumnya juga wajib).<sup>50</sup>

Abdul Haris, dkk dalam penelitiannya menyebut orientasi ini dengan istilah orientasi moralitas idealitas, yaitu suatu sikap dan pandangan yang menekankan kepada peran penting perjuangan politik untuk merealisasikan cita-cita luhur yang dimiliki organisasi. Dalam konteks ini, sebagaimana disebutkan di awal NU didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah.<sup>51</sup>

### Bentuk keterlibatan Kiai NU dalam Politik Praktis di Kabupaten Jember

Sebagaimana dijelaskan bahwa keterlibatan aktif kiai NU dalam politik praktis kerap menuai kontroversi. Di satu sisi, keterlibatan mereka dalam dunia politik merupakan sebuah dinamika politik elit pesantren yang memiliki efek positif, lebih-lebih jika dikaitkan dengan fungsi kontrol atas kebijakan agar selaras dengan misi NU yang menganut ideologi Ahlussunnah wal Jama’ah. Namun di sisi lain, keterlibatan kiai NU dalam politik boleh jadi menimbulkan kesan negatif dari masyarakat ketika kiai melalaikan tugasnya dalam berdakwah karena terlalu “sibuk” dalam politik, bahkan terkadang kerap kali membingungkan umat jika pilihan politik antar satu kiai dengan kiai lainnya berbeda.

Sebagai elit lokal, kiai memiliki kharisma yang mampu memobilisasi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Hal ini disebabkan, pola interaksi kiai dan santri terjalin sangat erat, sehingga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan sikap dan pilihan politik. Interaksi kiai dan santri tidak hanya terjalin ketika berada di pesantren, saat santri sudah keluar

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Imam Habibul Haramain di kediamannya, PP. Al-Hidayah Silo, 10 September 2019.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Misbahussalam di Kantor Baznas Jember, 8 Oktober 2019.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Gus Ghalban Aunirrahman di kediamannya, PP. Zainab Shiddiq Talangsari, 15 September 2019.

<sup>51</sup> Abdul Haris, dkk, “Pergeseran Perilaku Politik Kultural Nahdlatul Ulama (NU) di Era Multi Partai Pasca Orde Baru Studi Kasus NU Jember Jawa Timur,” *Istiqro’*, Vol. 2, No. 01 (2003).

pesantren, jalinan interaksi pun masih tetap berjalan.

Sementara itu, seorang kiai yang aktif menjadi anggota sebuah parpol, biasanya akan terjun langsung menjadi juru kampanye ketika dalam kontestasi politik untuk mendukung parpol yang bersangkutan. Dengan modal kharisma dan basis massa yang kuat, kiai memiliki peranan signifikan dalam mendulang suara parpol tersebut.

Selain model kiai sebagaimana di atas, ada juga kiai yang hanya sekedar partisipan, tidak terlibat langsung dalam arena politik. Kiai hanya memberi restu kepada calon yang dia pilih. Kiai tidak terjun langsung berkampanye atau menjadi tim sukses. Sikap ini adalah sebuah langkah yang dipilih untuk masa depan pesantren jika calon yang dipilih gagal. Berangkat dari pembahasan tentang orientasi kiai terlibat dalam politik praktis di atas, maka uraian berikutnya akan memaparkan hasil temuan serta analisa peneliti terkait ragam bentuk keterlibatan kiai dalam politik praktis di Jember dengan fokus kepada kontestasi Pilres 2019.

Di Jember, kiai NU menjadi kekuatan penting yang bisa mengarahkan preferensi politik masyarakat dalam menentukan pilihan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakilnya. Berdasarkan temuan di lapangan, setidaknya ditemukan beberapa bentuk dukungan kiai NU kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf, diantaranya:

*Pertama*, mengeluarkan pernyataan sikap politik dalam bentuk surat edaran atau *maklumat* dan video durasi pendek yang disebar di medsos. Cara seperti ini dilakukan oleh PP. Darus Sholah Tegal Besar.

Dalam konteks ini, Gus Ghalban menyatakan bahwa selama ini baik dalam kontestasi Pilgub atau Pilpres, PP. Darus Sholah tidak pernah mengeluarkan edaran untuk mendukung calon tertentu, termasuk Yayasan Kyai Ahmad Shiddiq tidak pernah memberi instruksi apa-apa, tapi khusus Pilpres 2019 lalu dia merasa “wajib” untuk memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf secara aktif. Sekalipun ketika Jokowi ke Jember tidak “*sowan*” ke PP. Darus Sholah, tapi hal ini tidak menyurutkan semangat untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf. Tidak hanya membuat surat edaran, tapi dia juga mengumpulkan semua wali santri, alumni dan masyarakat sekitar untuk mengkampanyekan Jokowi-Ma'ruf.<sup>52</sup>

Tindakan serupa juga dilakukan oleh Kiai Rosyidi, dia menuturkan:

“Kepada alumni beserta santri, dengan tegas saya keluaran *maklumat* untuk memilih Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tidak hanya sekedar surat edaran, bahkan di medsos dengan tegas saya mengajak santri dan alumni lewat video agar memilih dan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.”<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Gus Ghalban Aunirrahman di kediamannya, PP. Zainab Shiddiq Talangsari, 15 September 2019.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Rosyidi Baihaqi di kediamannya, PP. Miftahul Ulum Kalisat, 18 September 2019.

## Kiai NU Dan Politik (Keterlibatan Kiai NU Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)

Seruan melalui video dengan durasi pendek yang disebar di medsos juga dilakukan oleh kiai-kiai lainnya, seperti kiai Misbah Umar PP. Sumber Wringin Sukowono, Kiai Ahmad Sanusi PP. Miftahul Ulum Tamanbaru Kalisat, Kiai Hanafi Mudzhar PP. Miftahul Ulum Suren Ledokombo dan Kiai Muhammad Syakir Shonhaji PP. Assyafi'iyah Sukorejo Bangsalsari.

*Kedua*, konsolidasi sesama kiai untuk memenangkan calon yang dipilih. 17 Februari 2019, sekitar 200 kiai pengasuh pondok pesantren NU Jawa Timur melakukan konsolidasi dan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf di PP. Nurul Islam Antirogo Jember. Beberapa kiai yang hadir dalam deklarasi dukungan tersebut adalah kiai sepuh struktural NU dan mayoritas dari mereka adalah pengasuh dari pondok pesantren di Jember, seperti KH. Muhyiddin Abdusshomad, Rois Syuriah PCNU Jember dan Pengasuh PP. Nurul Islam Antirogo, KH. Imam Habibul Haramain, Wakil Rais Syuriah PCNU Jember dan Pengasuh PP. Al-Hidayah Silo, KH. Badrus Shodiq, Ketua LDNU PCNU Jember dan Pengasuh PP. Darul Hidayah Gambirone, KH. Saiful Rijal (Gus Sef) Pengasuh PP. Asri Talangsari Jember, dan puluhan kiai lainnya.

Juru bicara para kiai dalam acara tersebut, Gus Zainil Ghulam, Pengasuh Ponpes Darul Muqomah Kecamatan Gumukmas Jember, menyatakan bahwa pilihan untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf tak lepas dari berbagai pertimbangan, diantaranya pertimbangan fikih, dalam hukum Islam, bahwa yang lebih mashlahat untuk perjuangan Ahlussunnah wal Jama'ah (*an-nadbiyyah*) adalah pasangan Jokowi-Ma'ruf.<sup>54</sup>

*Ketiga*, melakukan seruan secara langsung untuk memenangkan pasangan yang dipilih. Dalam hal ini kiai biasanya memberikan instruksi dengan mengumpulkan para santri, wali santri, dewan guru/*asatidz*, alumni dan simpatisan pesantren untuk mendukung pasangan pilihannya.

Cara seperti ini dilakukan oleh Kiai Imam Haramain. Ketika ditanya bentuk dukungan yang diberikan untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf, kiai sepuh yang aktif di PKB ini menjelaskan:

“Dalam kontestasi Pileg, Pilbup dan Pilgub saja saya memberi instruksi kepada santri untuk memilih calon tertentu, apalagi dalam kontestasi Pilres 2019 kemarin. Secara tegas saya meminta santri, wali santri dan alumni untuk mengikuti pilihan saya. Itu bentuk ikhtiyar saya, walaupun kemudian mereka tidak mengikuti saya, ya itu merupakan hak

---

<sup>54</sup> <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/200-kiai-nu-jember-deklarasikan-dukkungan-untuk-jokowi-maruf-amin/>, diakses 28 September 2019.

mereka. Saya tidak dapat memaksakan.”<sup>55</sup>

Penegasan Kiai Imam di atas menunjukkan bahwa dia benar-benar *all out* dalam mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf, hal ini dapat dimaklumi sebab selain karena faktor jabatan strukturalnya di NU (Wakil Rais Syuriah), kiai Imam Haramain juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB Jember, sehingga secara otomatis dia juga akan mengkampanyekan pasangan calon yang diusung partainya.

Sementara itu, Kiai Dawam Wahid memanfaatkan “mesin” jama'ahnya, ranting NU hingga anak ranting juga untuk mengkampanyekan Jokowi-Ma'ruf. Menurutny, meski di daerahnya mayoritas adalah *nabdliyyin*, namun jika warga tidak dimobilisir dengan baik, bisa jadi pasangan Jokowi-Ma'ruf kalah. Karena itu ketika mendapat instruksi dari atasan untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf, kiai Dawam langsung bergerak dan bergegas turun ke bawah.<sup>56</sup>

Berbeda dengan para kiai sebagaimana disebutkan di atas, kiai Mahmudul Huda memiliki perspektif yang berbeda dalam mengaktualisasikan dukungannya kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Kiai Mahmudul Huda tidak pernah mengajak orang lain untuk mengikuti pilihannya, karena baginya itu merupakan hak prerogatif setiap orang. Dia mengkhawatirkan jika orang yang diajak ternyata sudah memiliki pilihan yang berbeda, karena itu dia lebih mementingkan persaudaraan.<sup>57</sup>

Oleh karena totalitas dukungan dari kiai NU dan *power* pesantren dengan segala jaringannya pada akhirnya pasangan Jokowi-Ma'ruf berhasil meraih suara terbanyak di Kabupaten Jember. Jokowi-Ma'ruf meraih 891.208 suara (64,82 persen) sementara pasangan Prabowo-Sandi meraih 483.786 suara (35,18 persen). Bahkan dari 31 Kecamatan di Kab. Jember, Pasangan Jokowi-Ma'ruf berhasil sapu bersih dengan menang di 29 Kecamatan, hanya kalah di Kecamatan Sumberbaru dan Tanggul.<sup>58</sup>

Karena itu tidak berlebihan jika Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyatakan bahwa NU menjadi penentu kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah pasangan Jokowi-Ma'ruf berhasil menang signifikan. Berdasarkan data *exit poll* yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 56 persen warga NU mengaku memilih Jokowi-Ma'ruf. Angka tersebut naik 12 persen dibanding Pilpres 2014 dimana *nabdliyyin* yang memilih Jokowi hanya 44 persen. Soliditas NU dalam memilih Jokowi, menurut Burhan, tak lepas dari sosok KH. Ma'ruf Amin yang

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Imam Habibul Haramain di kediamannya, PP. Al-Hidayah Silo, 10 September 2019.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Dawam Wahid di Kantor PCNU Jember, 5 Oktober 2019.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Mahmudul Huda di Kantor PCNU Jember, 12 Oktober 2019.

<sup>58</sup> <https://jatim.tribunnews.com/2019/04/29/hasil-rekapitulasi-final-di-jember-jokowi-menang-telak-atas-prabowo-di-29-kecamatan?page=2>, diakses 5 Oktober 2019.

## Kiai NU Dan Politik (Keterlibatan Kiai NU Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)

mewakili Jokowi.<sup>59</sup>

Beberapa bentuk keterlibatan kiai dalam politik praktis di atas, setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa keragaman atau kompleksitas kiai dalam berpolitik tidaklah tunggal. Kiai tidak hanya menjadi tokoh atau panutan dalam hal agama saja, melainkan, mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perkembangan dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Keterlibatan kiai yang sangat intens dalam memberikan dukungan kepada calon pilihannya sangat memberikan pengaruh positif terhadap preferensi politik masyarakat. Seruan secara langsung, baik melalui edaran/maklumat dan media sosial, sampai kehadiran kiai dalam kampanye memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perolehan suara.

### SIMPULAN

Dari beberapa uraian yang didasarkan pada penemuan di lapangan sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan; pertama, mayoritas kiai NU Jember memaknai politik dengan perjuangan untuk mewujudkan kemashlahatan umat. Politik juga dimaknai dengan upaya untuk menjaga aqidah umat dari faham atau ideologi yang berseberangan dengan NU. Bagi kiai NU Jember, politik tidak hanya soal kekuasaan, tapi juga soal aqidah yang merupakan tugas pokok ulama (kiai) untuk menjaganya. Aqidah tersebut bisa dijaga salah satunya dengan cara terlibat dalam politik.

Kedua, setidaknya ditemukan dua motivasi yang mendorong keterlibatan kiai NU Jember dalam politik praktis, termasuk dalam ajang kontestasi Pilpres 2019; *pertama*, orientasi dakwah, tugas kiai sebagai ahli agama yang dituntut untuk selalu mengajak kepada kebaikan dan melarang dari keburukan membuat kiai turut ambil bagian dalam panggung politik, baik secara aktif maupun pasif. *Kedua*, orientasi ideologis, kaitannya dengan Pilpres 2019, munculnya sosok Kyai Ma'ruf Amin yang notabene Rais Syuriah NU mendampingi Jokowi, menjadikan kiai NU "turun gunung" untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Lebih-lebih melihat fakta bahwa rival Jokowi-Ma'ruf, yakni Prabowo-Sandi didukung oleh kelompok-kelompok yang secara ideologis berbeda dengan ideologi sunni NU.

Ketiga, bentuk keterlibatan kiai NU dalam politik praktis (pilpres 2019) di Kabupaten Jember dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya; *Pertama*, mengeluarkan pernyataan sikap politik dalam bentuk surat edaran atau *maklumat* dan video durasi pendek yang disebar di medsos. *Kedua*, konsolidasi sesama kiai untuk memenangkan calon yang dipilih. *Ketiga*, melakukan seruan secara langsung untuk memenangkan pasangan yang dipilih. Dalam hal ini kiai biasanya memberikan instruksi dengan mengumpulkan para santri, wali santri, dewan

---

<sup>59</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1408584/12/nahdlatul-ulama-jadi-penentu-kemenangan-jokowi-di-pilpres-2019-1559146860>, diakses 10 November 2019.

guru/*asatidz*, alumni dan simpatisan pesantren untuk mendukung pasangan pilihannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Bisma Satu Printing, 1999.
- Azizah, Nurul. *Artikulasi Politik Santri: Dari Kyai Menjadi Bupati*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Echols, John M. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Feillard, Andree. *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Haris, Abdul, dkk. "Pergeseran Perilaku Politik Kultural Nahdlatul Ulama (NU) di Era Multi Partai Pasca Orde Baru Studi Kasus NU Jember Jawa Timur." *Istiqro'*, Vol. 2, No. 01 (2003).
- J. Clifford, "Introduction: Patrial Truths", dalam J. Clifford and Marcus, G.E (ed.), *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. Berkeley: University of California Press, 1986.
- Karim, A.Gaffar. *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah al-Syari'ah*. Kairo: Daral Ansar, 1997.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Miles, M. B dan Huberman, A.M, *Qualitative Data Analysis* (terjz). Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1994.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhibbin. *Politik Kiai vs Politik Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Muhtadi, Asep Saeful. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Politik Santri: Cara Merebut Hati Rakyat*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Muzadi, Abdul Muhith. "Masa-masa Ujian Berat bagi NU." *Aula*, No.11, Nopember (1995).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, 2017.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, 9th Edition. London: Sage Publication, 2000.
- Patoni, Achmad. *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

## Kiai NU Dan Politik (Keterlibatan Kiai NU Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)

- Purwodarmino, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Rahman, Fathor. *Mengembalikan NU ke Ranah Politik Praktis*. Jember: LTN NU Jember, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Singgasana Politik Kiai Madura*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Salim, Abdul Mu'in. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Turmudi, Endang. *Perselingkuban Kiai Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2004).
- Wahid, Salahuddin. *Menggagas Peran Politik NU*. Jakarta : Pustaka Indonesia Satu, 2002.
- Warid, Ahmad. "Fiqh Politik NU; Studi Pergeseran dari Politik Kebangsaan ke Politik Kekuasaan." *al-Syir'ah*, Vol. 1 (2009).
- Yusuf, Slamet Effendi. *Dinamika Kaum Santri*. Jakarta: Radjawali Press, 1985.
- Zada, A. Khamami. *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004.